

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dipandang sebagai ilmu dan disiplin akademis. Kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu, kelompok, dan masyarakat. Kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya.

2.1.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu konsep yang mempunyai arti yang sangat luas. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjukkan pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.(Fahrudin, 2014)

Kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir dalam suatu lembaga dan pelayanan sosial sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk

mencapai kehidupan yang sejahtera dengan cara meningkatkan kemampuan individu dan kelompok baik dalam memecahkan masalahnya maupun dalam memenuhi kebutuhannya.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan yang terorganisir dan dinamis dengan segala keterampilan ilmiah, yang berusaha mengembangkan metodologi dari aspek strategi dan teknis untuk menangani masalah sosial dengan bertujuan membantu individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.

Suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. (Suharto, 2011)

Kesejahteraan sosial menurut Suharto di atas bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang terorganisir yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta dan bertujuan untuk mencegah dan membantu mengatasi masalah sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.1.2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki tujuan utama untuk mencapai standar kehidupan individu, kelompok ataupun masyarakat berdasarkan konteks sosial. Hal tersebut meliputi kebutuhan-kebutuhan pokok, serta untuk mencapai penyesuaian diri yang baik dengan masyarakat di sekitarnya.

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.

2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. (Huraerah, 2011)

Tujuan kesejahteraan sosial juga, berfokus pada pola pencapaian kehidupan pokok manusia yang mencakup kebutuhan ekonomi fisik, ekonomi, sosial, serta penyesuaian diri terhadap taraf hidup yang memuaskan bagi kehidupannya.

2.1.3. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan dan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta mampu menciptakan kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. fungsi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*).
- b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*).
- c. Fungsi Pengembangan (*Development*).
- d. Fungsi Penunjang (*Supportive*) (Friedlander dan Apte dalam (Fahrudin, 2012)

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial meliputi fungsi pencegahan, penyembuhan, pengembangan, penunjang bagi kehidupan masyarakat. Fungsi-fungsi ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, situasi, serta kondisi masyarakat itu sendiri berikut beberapa penjelasan mengenai fungsi-fungsi tersebut:

a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*).

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola yang baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*).

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi sosial kembali dalam masyarakat. Fungsi ini juga mencakup fungsi pemulihan atau rehabilitasi.

c. Fungsi Pengembangan (*Development*).

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat

d. Fungsi Penunjang (*Supportive*).

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial yang lain.

2.1.4. Pendekatan Kesejahteraan Sosial

Pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial merupakan hal yang penting bagi penunjang pelaksanaan aktivitas bagi keilmuan dan praktik kesejahteraan sosial. Pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Filantropi sosial
2. Pekerjaan Sosial
3. Administrasi Sosial
4. Pembangunan Sosial (Menurut Midgley dalam Fahrudin, 2014)

Pendekatan kesejahteraan sosial terdiri dari filantropi sosial, pekerjaan sosial, administrasi sosial dan pembangunan sosial. Beberapa metode pendekatan ini menggunakan teknik yang berbeda pendekatan ini digunakan agar masyarakat mampu keluar dari disfungsi sosial. Berikut adalah beberapa pendekatan kesejahteraan sosial:

1. Filantropi Sosial

Pendekatan ini merupakan kesejahteraan sosial yang dilakukan para agamawan dan relawan, yakni upaya yang bersifat amal (*charity*) dimana orang-orang ini menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain, pelaku dari filantropi ini disebut dengan filantropis.

2. Pekerjaan sosial

Pekerjaan sosial disini merupakan pendekatan yang teroganisir untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menggunakan tenaga professional yang memenuhi syarat untuk menangani masalah sosial. Perkembangan pekerjaan sosial sendiri juga tidak lepas dari adanya filantropi. Pada abad ke-19 pekerjaan sosial telah mengalami pengembangan professional dan akademik yang cukup pesat dan telah menyebar di seluruh dunia.

3. Administrasi sosial

Pendekatan administrasi sosial berusaha mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menciptakan berbagai macam program guna meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, biasanya dengan penyediaan pelayanan sosial yang dilakukan oleh pemerintah

4. Pembangunan sosial

Pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara utuh, di mana pembangunan ini dilakukan untuk melengkapi dinamika proses pembangunan ekonomi.

Awal mula terjadinya pendekatan kesejahteraan sosial dimulai dari Filantropi yang sifatnya charity atau awal merupakan pendekatan yang pertama sebelum berkembang pada pendekatan yang lainnya. Setelah adanya filantropi sosial, muncul pendekatan kedua yaitu pekerjaan sosial yang lebih fokus pada penanganan masalah sosial. Administrasi sosial yang lebih dikenal dengan pemberian program atau pelayanan sosial dari pemerintah untuk masyarakat nya. Yang terakhir adalah pembangunan sosial yang erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial disini harus terencana karena bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.2. Konsep Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan yang profesional. Pekerjaan sosial sendiri memfokuskan kepada kegiatan pemberian pelayanan sosial agar individu,

kelompok dan masyarakat mampu menjalankan keberfungsian sosialnya atau fungsi sosialnya dengan baik.

Social work is the professional activity of helping individuals, groups or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. Social work practice consists of the professional application of social work values, principles, and techniques to on or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counselling and psychotherapy for individuals, families, and groups; helping communities or groups; helping communities or groups provide or improve social and health services; and participating in relevant legislative processes. The practice of social work requires knowledge of human development and behavior; of social, economic, and cultural institutions; and of the interaction of all these factors.

Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas untuk meningkatkan atau memulihkan kapasitas mereka untuk fungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan bagi tujuan mereka. Praktik pekerjaan sosial terdiri dari penerapan nilai-nilai, prinsip, dan teknik kerja sosial secara profesional pada atau lebih dari. Pekerjaan sosial juga memiliki tujuan sebagai berikut: membantu orang mendapatkan layanan nyata; memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu, keluarga, dan kelompok; membantu masyarakat atau kelompok; membantu masyarakat atau kelompok memberikan atau meningkatkan layanan sosial dan kesehatan; dan berpartisipasi dalam proses legislatif yang relevan. Praktek pekerjaan sosial membutuhkan pengetahuan tentang perkembangan dan perilaku manusia; dari institusi sosial, ekonomi, dan budaya; dan interaksi semua faktor ini. Asosiasi nasional pekerjaan sosial amerika serikat (NASW) dalam Fahrudin (Fahrudin, 2014)

Pekerjaan sosial tidak lepas dari penerapan nilai, prinsip, dan tujuan yang mereka miliki. Pekerjaan sosial sendiri berfokus pada proses pertolongan yang dilakukan kepada individu, kelompok maupun masyarakat. Proses pertolongan ini diberikan kepada mereka yang memang memiliki disfungsi sosial atau keberfungsian sosial yang tidak berjalan dengan baik.

Keberfungsian sosial dapat diartikan sebagai berjalan atau tidaknya peran seseorang di dalam masyarakat. Keberfungsian sosial merupakan resultant dari interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di masyarakat, seperti system pendidikan, sistem keagamaan, sistem keluarga, sistem politik, sistem pelayanan sosial, dan seterusnya (Suharto, 2011). Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.

1. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
2. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
3. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial. NASW yang dikutip Fahrudin (Fahrudin, 2014)

Secara tradisional pekerja sosial mempunyai tiga metode pokok dan tiga metode pembantu, yaitu: “(1) Metode Pokok: *social case work*, *Social group work*, dan *Community Organization/Community Development*. (2) Metode Pembantu: *Social work administration*, *Social action*, dan *Social work research*”. (Fahrudin, 2014)

Metode-metode tersebut digunakan berdasarkan dan kebutuhan dari klien yang ditangani oleh para pekerja sosial. Semua tergantung kepada kasus atau

masalah yang ada, sehingga penanganannya perlu disesuaikan sehingga dapat bisa ditangani dengan efektif dan efisien.

2.2.1. Fokus Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai proses pertolongan memiliki banyak peranan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi selama pelaksanaan dari awal proses. Adapun peranan yang dimiliki oleh pekerja sosial yaitu sebagai fasilitator, mediator, broker, pembimbing, perencana, pemecah masalah, dan evaluator. Peranan tersebut mengawal pekerja sosial menuju peningkatan keberfungsian sosial yang kinerjanya dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya
- b. Menghubungkan orang dengan system dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau dan memperoleh berbagai sumber, pelayanan dan kesempatan.
- c. Meningkatkan kinerja lembaga- lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas, dan berprikemanusiaan.
- d. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. (Dubois dan Miley yang dalam Suharto, 2011)

Pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya, tidak sama dengan profesi seperti psikologi, dokter, psikiater. Contohnya, ketika mengobati seorang pasien maka psikolog hanya berfokus pada kejiwaan pasiennya saja. Namun, berbeda dengan pekerja sosial yang ketika menghadapi klien, mereka tidak hanya melihat kepada target perubahan, melainkan kepada lingkungan sosial di mana pasien berada, bagaimana orang- orang di sekelilingnya yang juga memiliki pengaruh yang besar kepada keadaan klien. Ruang pekerja sosial adalah menolong klien

sebagai pelayanan sosial baik untuk individu, keluarga, kelompok, baik masyarakat yang membutuhkannya menggunakan nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan profesional pekerja sosial. Fokus utama dari pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial (fungsi sosial) melalui serangkaian proses yang memiliki tujuan dan strategi.

Keberfungsian sosial merupakan konsep yang memiliki substansi yaitu keterkaitan, hubungan, interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di masyarakat seperti sistem keagamaan, sistem pendidikan, sistem pelayanan sosial, sistem keluarga, sistem politik dan lain-lain. Contohnya adalah kemampuan individu dalam menjalankan peran sosial adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya. Misalnya, seorang ibu memiliki peran sebagai pendidik, pengelola keuangan, pasangan suaminya. Oleh karena itu, seorang ibu dapat meminta izin fungsi tersebut. Namun, disetujui ibu tidak dapat melakukan peranannya karena sakit, cacat, atau halangan lain maka ia dapat disetujui tidak menggunakan sosial atau disfungsi sosial.

2.2.2. Fungsi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial dalam penyelenggaraannya mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Pekerjaan sosial bertujuan untuk membantu mengoptimalkan potensi yang dimiliki individu, kelompok maupun masyarakat. Penunjang terhadap tujuannya juga membagi fungsi dasar pekerjaan sosial menjadi empat bagian sebagai berikut:

1. Mengembangkan memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.

2. Menjamin memadai nya standar-standar subsistensi kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang.
3. Meningkatkan kemampuan orang untuk melaksanakan fungsinya secara optimal sesuai dengan status dan peranan mereka di dalam institusi-institusi sosial.
4. Mendorong dan meningkatkan ketertiban sosial (*social order*) serta struktur institusional masyarakat. (Siporin dalam Sukoco (1992: 52-54)

Fungsi-fungsi pekerjaan sosial yaitu berfokus pada kebutuhan-kebutuhan dasar. standar- standar kesehatan dan kesejahteraan, status dan peranan dalam institusi sosial. ketertiban sosial struktur institusional yang ada pada masyarakat demi tercapainya keberfungsian sosial.

2.2.3. Prinsip-Prinsip Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai proses yang tentunya profesional, dalam ketentuannya memiliki prinsip-prinsip yang menaungi dan mengiringi dalam kelangsungannya. ada enam prinsip dasar dalam praktek pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan
2. Komunikasi
3. Individualisasi
4. Partisipasi
5. Kerahasiaan
6. Kesadaran Diri Pekerja (Mans dalam Fahrudin, 2014)

1. Penerimaan

Prinsip ini mengemukakan tentang pekerja sosial yang menerima klien tanpa "menghakimi" klien tersebut sebelum, pekerja sosial untuk menerima klien dengan sewajarnya akan lebih membantu pengembangan relasi antara pekerja sosial dengan klien nya. Dengan adanya sikap menerima maka klien akan dapat lebih percaya diri dan dengan demikian klien dapat

mengungkapkan berbagai macam perasaan dan kesulitan yang mengganjal di dalam pembicaraan.

2. Komunikasi

Prinsip komunikasi ini dengan mudah dapat mendukung. Untuk komunikasi dengan klien, baik dalam bentuk komunikasi yang verbal, yang meminta klien melalui sistem klien, maupun bentuk komunikasi nonverbal, seperti cara membuka klien, memilih cara duduk, duduk dalam suatu pertemuan dengan anggota keluarga yang lain.

3. Individualisasi

Prinsip individualisasi pada intinya mempertimbangkan setiap individu yang berbeda satu sama lain, sehingga seorang pekerja sosial haruslah mengatur cara memberi klien nya, guna mendapatkan hasil yang diinginkan.

4. Partisipasi

Berdasarkan prinsip ini, seorang pekerja sosial harus meminta klien nya untuk mendorong aktif dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga klien dapat menggunakan sistem klien yang juga menyediakan rasa bantuan untuk bantuan tersebut. Karena tanpa ada kerja sama dan peran serta klien maka upaya bantuan sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal.

5. Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan ini akan memungkinkan klien atau sistem klien mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan dan bahaya ia hadapi dengan rasa aman, karena ia yakin apa yang ia utarakan dalam hubungan kerja

dengan pekerja sosial akan tetap dijaga (dirahasiakan) oleh pekerja sosial agar tidak diketahui oleh orang lain (mereka yang tidak berkepentingan).

6. Kesadaran diri Pekerja Sosial

Prinsip kesadaran diri ini menuntut pekerja sosial untuk menjalin relasi profesional dengan menjalin relasi dengan klien nya, dalam arti pekerja sosial yang mampu menggerakkan benar-benar terhanyut oleh perasaan atau bantuan yang disampaikan oleh klien nya tidak "kaku" dalam percakapan dengan pekerja sosial, yang pesan informasi atau cara bicara, cara berbicara, dan lain-lain, bantuan dengan setiap tanggung jawab terhadap keberhasilan proses.

Suharto (2008:114) menyebutkan bahwa ada beberapa setting pekerjaan sosial yang dapat diperhatikan dalam memberikan proses pertolongan kepada klien, yaitu:

1. Keluarga dan pelayanan anak.

Kegiatan yang dilakukan dapat berupa: penguatan keluarga, konseling keluarga, pemeliharaan anak dan adopsi, perawatan harian, pencegahan penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kesehatan dan rehabilitasi.

Kegiatan yang dilakukan berupa: pendampingan pasien di rumah sakit, pengembangan kesehatan masyarakat, kesehatan mental, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi pecandu obat dan alkohol, pendampingan ODHA, Harm Reduction Programmers.

3. Pengembangan masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan berupa: perencanaan sosial, pengorganisasian masyarakat, revitalisasi ketenangan, perawatan lingkungan hidup, ketahanan sosial, penguatan modal sosial dan ekonomi kecil.

4. Pelindungan sosial.

Kegiatan yang dilakukan berupa: skema asuransi sosial, bantuan sosial, social fund, jaring pengaman sosial.

5. Pelayanan kedaruratan.

Kegiatan yang dilakukan berupa: pengorganisasian bantuan, manajemen krisis, informasi dan rujukan, integrasi pengungsi, pengembangan peringatan dini masyarakat.

6. Pekerjaan sosial sekolah.

Kegiatan yang dilakukan berupa: konseling penyesuaian sekolah, manajemen perilaku pelajar, manajemen tunjangan biaya pendidikan, pengorganisasian makan siang murid, peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam pendidikan.

7. Pekerjaan sosial industri.

Kegiatan yang dilakukan berupa: program bantuan pegawai, penanganan stres dan burn-out, penempatan dan relokasi kerja, perencanaan pensiun, tanggung jawab sosial perusahaan.

2.2.4. Tahapan-Tahapan Intervensi Pekerjaan Sosial

Intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial akan melalui beberapa tahapan. Dalam pelaksanaannya tahapan- tahapan ini disebut dengan tahapan

intervensi pekerjaan sosial tahapan-tahapan intervensi pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap *engagement, intake* dan *contract*
- b. Tahap *Assessment*
- c. Tahap Membuat Perencanaan Intervensi
- d. Tahap Melaksanakan Program Berdasarkan Rencana Intervensi
- e. Tahap Evaluasi
- f. Tahap Terminasi. (Siporin dalam Iskandar 2013)

Tahapan intervensi pekerjaan sosial di atas merupakan suatu tahapan – tahapan yang harus dipahami oleh seluruh pekerja sosial. Tahapan – tahapan ini bisa diterapkan pada individu, kelompok, dan masyarakat. Pada tahapan tersebut hal-hal yang dilakukan pekerja sosial adalah sebagai berikut:

- a. Tahap *engagement, intake* dan *contract*

ini adalah tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang akan diberikan oleh pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien. Kontrak diartikan sebagai suatu kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien yang di dalamnya dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan- tujuan pertolongan yang hendak dicapai, peranan- peranan dan harapan- harapan pekerja sosial dan klien, metode – metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan- pengaturan lainnya.

- b. Tahap *Assessment*

Assessment merupakan proses pengungkapan dan pemahaman masalah klien, yang meliputi: bentuk masalah, ciri- ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor- faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya

pemecahan masalah yang terdahulu yang pernah dilakukan klien, kondisi keberfungsian klien saat ini dan berdasarkan hal itu semua maka dapat ditentukan fokus atau akar masalah klien

c. Tahap Membuat Perencanaan Intervensi

Rencana intervensi merupakan proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan- kegiatan apa yang dilakukan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah tersebut.

d. Tahap Melaksanakan Program Berdasarkan Rencana Intervensi

Pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien. Dalam pemecahan masalah ini hendaknya pekerja sosial melibatkan klien secara aktif pada setiap kegiatan.

e. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini pekerja sosial harus mengevaluasi kembali semua kegiatan pertolongan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilannya, kegagalannya atau hambatan yang terjadi. Ada dua aspek yang harus dievaluasi oleh pekerja sosial yaitu tujuan hasil dan tujuan proses

f. Tahap Terminasi

Tahap terminasi dilakukan bilamana tujuan pertolongan telah dicapai atau bilamana terjadi kegiatan referral atau bilamana karena alasan- alasan yang rasional klien meminta pengakhiran pertolongan atau karena adanya faktor- faktor eksternal yang dihadapi pekerja sosial atau karena klien lebih baik dialihkan ke lembaga- lembaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih

berkompeten. Pembagian kerja yang jelas akan mempermudah pelaksanaan pelayanan sosial sampai pada tujuan yang diharapkan.

2.2.5. Peran- Peran Pekerja Sosial

Peran pekerja sosial dalam menangani masalah mencakup masalah tiga level yakni, level mikro (individu), mezzo (keluarga dan kelompok kecil) dan makro (organisasi atau masyarakat). Pada masing-masing level peran pekerja sosial memiliki metode-metode yang berbeda-beda dalam penanganannya. Di level mikro dikenal sebagai *casework* (terapi perseorangan atau terapi klinis), di level mezzo ada beberapa metode *group work* (terapi kelompok) dan *family therapy* (terapi keluarga) dan pada level makro menggunakan metode *community development* (pengembangan masyarakat) atau *policy analysis* (analisis kebijakan).

Peranan adalah sekumpulan kegiatan altruistik yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dilakukan bersama antara penyedia dan penerima pelayanan. Peranan merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menggunakan kemampuannya dalam situasi tertentu. Dalam profesi Pekerja sosial profesional, peranan ini tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan peranan yang dilakukan oleh profesi lain sebagai mitra kerja, berikut ini beberapa variabel yang menentukan peranan Pekerja sosial profesional, yaitu:

1. Pendekatan dualistik dalam pekerjaan sosial: perubahan dan pengembangan personal, serta perubahan dan pengembangan sebagai satu kesatuan.
2. Fungsi-fungsi praktik pekerjaan sosial yang saling berkaitan: pencegahan dengan mengembangkan penelitian, analisis, penyusunan dan pengembangan kebijakan, program dan pelayanan kesejahteraan sosial. (J. Marbun 2011:154)

Pekerja Sosial memiliki peran dalam mengatasi permasalahan sosial, karena Pekerja Sosial merupakan profesi yang memberikan pertolongan dalam membantu individu, kelompok maupun masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kehadiran pekerja sosial tidak hanya semata-mata untuk membantu masyarakat, tetapi juga pekerja sosial memiliki peranan yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.

Peran Pekerja Sosial adalah peran yang dilakukan pekerja sosial dalam suatu masyarakat atau badan atau lembaga atau panti sosial akan beragam tergantung pada permasalahan yang dihadapinya.

Peranan yang dilakukan oleh pekerja sosial antara lain:

1. Peranan Sebagai Perantara (*Broker Roles*)
2. Peranan Sebagai Pemungkin (*Enabler Roles*)
3. Peranan Sebagai Penghubung (*Mediator Role*)
4. Peranan Sebagai Advokasi (*Advocator Role*)
5. Peranan Sebagai Perunding (*Conferee Role*)
6. Peranan Pelindung (*Guardian Role*),
7. Peranan Sebagai Fasilitasi (*Fasilitator Role*)
8. Peranan Sebagai Inisiator (*Inisiator Role*),
9. Peranan Sebagai Negosiator (*Negotiator Role*) (Bradford W. Sheaford dan Charles R. Horejsi dalam oleh Suharto, 2011)

Pekerja sosial memiliki peran untuk mengatasi permasalahan dalam masyarakat, tergantung oleh permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut, berikut adalah penjelasan mengenai peran-peran pekerja sosial:

1. Peranan Sebagai Perantara (*Broker Roles*),

Pekerja sosial bertindak di antara klien atau penerima pelayanan dengan sistem sumber (bantuan materi dan non materi tentang pelayanan) yang ada di badan/lembaga/panti sosial. Selain sebagai perantara Peksos juga berupaya membentuk jaringan kerja dengan organisasi pelayanan sosial untuk mengontrol kualitas pelayanan sosial tersebut.

2. Peranan Sebagai Pemungkin (*Enabler Role*),

Peranan ini merupakan peran pekerja sosial yang sering digunakan dalam profesinya karena peran ini menggunakan konsep pemberdayaan dan difokuskan pada kemampuan, keahlian, kapasitas, dan kompetensi klien untuk menolong dirinya sendiri. Pada penganan ini pekerja sosial berperan sebagai konselor berusaha untuk memberikan peluang agar kebutuhan dan kepentingan klien dapat terpenuhi dan terjamin, mengidentifikasi tujuan, memfasilitasi untuk berkomunikasi, serta memberikan peluang untuk pemecahan masalah yang dihadapi klien . Klien melakukan semaksimal mungkin kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya agar dapat bermanfaat dan dapat mengatasi permasalahannya.

3. Peranan Sebagai Penghubung (*Mediator Role*),

Peran pekerja sosial sebagai penghubung (mediator role) adalah bertindak untuk mencari kesepakatan, sebagai penengah dalam perbedaan, konflik antar klien dengan keluarga, konflik antar klien yang satu dengan yang lain, untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dan memperoleh hak-hak yang semestinya.

4. Peranan Sebagai Advokasi (*Advocator Role*),

Peran yang dilakukan oleh pekerja sosial disini berbeda dengan advokat hukum. Advokat hukum dituntun melalui keinginan hukum sesuai dengan hukum pada suatu negara, sedangkan untuk advokat pekerja sosial dibatasi oleh kepentingan yang timbul dari klien atau penerima pelayanan.

5. Peranan Sebagai Perunding (*Conferee Role*)

Peranan yang diasumsikan ketika pekerja sosial dan klien atau penerima layanan mulai bekerja sama. Peran pekerja sosial ini dilakukan ketika pencarian data, pemberian gambaran pada korban.

6. Peranan Pelindung (*Guardian Role*)

Peran pekerja sosial sebagai pelindung (*guardian role*) sering kali dilakukan oleh bidang aparat, akan tetapi pekerja sosial dapat berperan melindungi klien atau penerima pelayanan, juga orang-orang yang beresiko tinggi terhadap kehidupan sosialnya.

7. Peranan Sebagai Fasilitasi (*Fasilitator Role*)

Seorang fasilitator pekerja sosial harus memberikan pelayanan yang bervariasi dalam memberikan pelayanannya tergantung pada kebutuhan serta masalah yang dihadapi klien hal ini bertujuan agar klien tidak merasa tertekan dan jenuh dengan pelayanan yang diberikan apabila pelayanan tersebut bervariasi dan menarik bagi klien. Disamping itu peran ini sangat penting untuk membantu meningkatkan keberfungsian khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu dalam pemecahan masalah yang dihadapi.

8. Peranan Sebagai Inisiator (*Inisiator Role*)

Peranan yang memberikan perhatian pada masalah atau hal-hal yang berpotensi untuk menjadi masalah.

9. Peranan Sebagai Negosiator (*Negotiator Role*)

Peran ini dilakukan terhadap klien yang mengalami konflik atau permasalahan dan mencari penyelesaiannya dengan kompromi dengan persetujuan dan kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Posisi seorang negosiator berbeda dengan mediator yang posisinya netral. Seorang negosiator berada pada salah satu posisi yang sedang memiliki konflik.

2.3. Tinjauan Tentang Masalah Sosial

2.3.1. Pengertian Masalah Sosial

Masalah sosial merupakan suatu gejala yang selalu ada dalam realitas kehidupan bermasyarakat dan merupakan kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Hal tersebut terjadi karena kondisi yang tidak sesuai seperti yang diharapkan atau bahkan tidak sesuai dengan nilai, norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Suatu kondisi dianggap sebagai masalah sosial karena menimbulkan berbagai penderitaan dan kerugian baik secara fisik maupun secara non fisik.

Situasi yang dinyatakan sebagai suatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, dimana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Dimana dari definisi tersebut memiliki tiga unsur penting yaitu:

1. Suatu situasi yang dinyatakan
2. Warga masyarakat yang signifikan
3. Kebutuhan akan tindakan pemecahan masalah. (Wainberg dalam (Soetomo, 2013)

Masalah sosial adalah kondisi yang tidak diharapkan selalu mendorong adanya tindakan untuk mengadakan perubahan dan perbaikan terhadap keadaan tersebut, agar terciptanya suatu kondisi keidupan yang lebih diharapkan dan kondisi yang sejahtera. Dan dari unsur di atas bahwa suatu

masalah dapat dikatakan sebagai suatu masalah sosial jika gejala tersebut didefinisikan dan diidentifikasi sebagai masalah sosial oleh masyarakat. Weinberg melihat bahwa masalah sosial sebagai hasil dari pelaksanaan masyarakat. Sedangkan (Kartono dalam Huraerah, 2011) berpandangan bahwa yang disebut masalah sosial yaitu:

- a. Semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memerkosa adat-istiadat masyarakat (dan adat-istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama).
- b. Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai gangguan, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak.

Definisi di atas bahwa suatu masalah sosial di anggap masalah apabila hal tersebut dianggap oleh sebagian besar warga masyarakat melanggar adat-istiadat dalam warga masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Dengan demikian bahwa adat istiadat dan kebudayaan tersebut memiliki nilai pengontrol terhadap tingkah laku dalam anggota masyarakat.

2.3.2. Karakteristik masalah sosial

Masalah sosial muncul karena adanya kekurangan dalam diri manusia yang bersumber dari faktor ekonomi, biologis, Bio psikologis serta kebudayaan. Faktor ekonomis yang salah satunya adalah kemiskinan masalah sosial memiliki 4 karakteristik, yaitu:

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang. Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun demikian, tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapat perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, masalah tersebut adalah masalah sosial.
2. Kondisi dinilai tidak menyenangkan. Menurut faham hedonisme, orang yang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat

sangat penting dalam menentukan suatu kondisi sebagai masalah sosial. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainnya

3. Kondisi yang menuntut pemecahan. Suatu yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan. Bila seseorang merasa lapar, akan segera dicarinya rumah makan. Bila sakit kepala, ia akan segera pergi ke dokter atau membeli obat. Umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan. Pada waktu lalu, masalah kemiskinan tidak dikategorikan sebagai masalah sosial, karena waktu itu masyarakat menganggap kemiskinan sebagai sesuatu yang alamiah dan masyarakat belum memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Sekarang, setelah masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menanggulangi kemiskinan, kemiskinan ramai diperbincangkan dan diseminarkan, karena dianggap sebagai masalah sosial.
4. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif, masalah sosial berbeda dengan masalah individual. Masalah individual dapat diatasi secara individual, tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang. (Huraerah, 2011)

2.3.3. Komponen Masalah Sosial

Masalah sosial memiliki empat komponen di dalamnya, agar dapat memahami arti dari masalah sosial yang sesungguhnya, maka perlu mengetahui komponen-komponen yang menyebabkan suatu masalah bisa disebut sebagai masalah sosial

- a. Masalah itu bertahan untuk suatu periode tertentu.
- b. Dirasakan dapat menyebabkan kerugian fisik atau mental, baik pada individu maupun masyarakat.
- c. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
- d. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan. (Parillo dalam Soetomo, 2013)

Suatu masalah dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila masyarakat dirasa masalah tersebut dapat menimbulkan kerugian secara luas, melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam masyarakat, dan masalah tersebut

membutuhkan pemecahan sebagai solusinya agar terciptanya suatu kondisi yang lebih dari harapan dan kondisi yang sejahtera.

2.4. Tinjauan Pengertian Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

2.4.1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan di definisikan sebagai suatu serangan atau invasi, baik fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt), atau tertutup (covert), baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain.

In general, violence is aggressive behavior with they intent to cause harm (physical or psychological). The word intent is central; physical or psychological harm that occurs by accident, in the absence of intent, is not violence. (Elizabeth K dalam Sopiah, 2013)

Secara umum kekerasan adalah perilaku agresif dengan maksud untuk menimbulkan kerugian (fisik atau psikis). Kata maksud adalah inti; Kerusakan fisik atau psikologis yang terjadi secara tidak sengaja, tanpa disengaja, bukanlah kekerasan. (Elizabeth K dalam Sopiah, 2013)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses secara hukum.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (UU PKDRT) adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang bersifat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan serta ancaman dan perampasan kemerdekaan dalam ruang lingkup rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu batasan yang mengacu pada kekerasan yang terjadi pada lokus atau wilayah keluarga. Keluarga disini tidak ada batasannya apakah keluarga inti atau keluarga luas. Siapapun yang dikategorikan sebagai anggota keluarga adalah pihak yang dikategorikan sebagai pelaku. Dari pandangan hukum diatas dapat diketahui bahwa keluarga merupakan salah satu tempat dimana kekerasan bisa terjadi. Kekerasan dalam keluarga tidak hanya menimpa perempuan tapi juga anak-anak karena posisi mereka lemah dan tidak berdaya.

2.4.2. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kejadian-kejadian seperti itulah yang memicu ketidakharmonisan diantara anggota keluarga. Tentunya tidak ada akibat jika tidak ada sebab yang melatarbelakangi. Begitu juga dengan tindak kekerasan yang terjadi dalam

lingkup rumah tangga, yang lebih dikenal dengan sebutan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Lingkup rumah tangga yang dipandang sebagai lingkungan yang seharusnya menjadi lingkungan yang damai dan memiliki kasih sayang, ternyata juga menyisahkan kisah yang memilukan dan menimbulkan kepedihan, terdapat beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya pola relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki (suami) dengan perempuan (isteri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya, kepercayaan menyatakan bahwa kekerasan ini dilakukan sebagai kekuasaan kepala keluarga (Sopiah, 2013)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga salah satunya dipengaruhi oleh faktor dan ideologi gender, dimana hal tersebut sudah menjadi budaya yang melekat bahwa laki-laki merupakan seorang pemimpin dan kepala keluarga, sehingga bersikap bahwa ia memiliki kekuasaan di dalam keluarga tersebut, maka apabila hal yang ia inginkan mungkin tidak terpenuhi maka terjadilah tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini

2.4.3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terbagi dalam beberapa jenis dan bentuknya, kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya mencakup kekerasan secara fisik saja

Tetapi meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut.

1. Penganiayaan/Kekerasan fisik (seperti pukulan, tendangan)
2. Penganiayaan/Kekerasan psikis atau emosional (seperti ancaman, hinaan, cemoohan)
3. Penganiayaan/Kekerasan seksual (pemaksaan hubungan seksual)
4. Penganiayaan/Kekerasan secara ekonomi (tidak memberi nafkah, memaksa istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan) (Sopiah, 2013)

Dalam kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk Kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sangat kompleks, bentuk kekerasan dalam rumah tangga berikut contoh-contoh kekerasan yang ada di dalam rumah tangga:

1. Kekerasan Fisik

Pada umumnya kekerasan fisik berwujud pemukulan dan penganiayaan menggunakan tangan kosong ataupun sarana benda alat-alat rumah tangga, *Lenore Warker* mengidentifikasi adanya tingkatan tiga tahap terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh para suami pemukul, yaitu (1) tahapan pembentukan ketegangan, (2) tahapan pemukulan berulang-ulang terjadi (3) tahapan perilaku cinta, lemah lembut dan penyesalan yang mendalam.

2. Kekerasan Psikis dan Emosional

Pada umumnya kekerasan psikis atau emosional adalah menghina, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana untuk mengisolasi istri dari dunia luar. Membuat istri merasa cemas, stress dan tidak nyaman berada di dalam rumah dengan cara membentak, memojokkan dengan kata-kata yang kurang senonoh sering membohongi korban dan menjadikan korban merasa tidak berguna dan berdaya.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ini biasanya meliputi pemaksaan hubungan seksual pada korban, seperti tidak pernah diajak berhubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak baik atau tidak disukai dan perusakan organ reproduksi perempuan.

4. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga, dimaksudkan bahwa suami tidak memberi nafkah kepada istri, membiarkan istrinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami, bahkan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.

Apabila melihat bentuk-bentuk kekerasan seperti yang telah disebutkan di atas, ada keterkaitan antara jenis kekerasan yang satu dan kekerasan yang lainnya. Sebagai contoh, kekerasan fisik secara tidak langsung akan menimbulkan kekerasan secara emosional atau psikologis dan kadang-kadang dua jenis kekerasan ini menimbulkan akibat atau trauma pada korban secara bersamaan. Kemudian, kekerasan emosional atau psikologis seperti, perselingkuhan dapat menimbulkan kekerasan fisik terjadi ketika pelaku berusaha menyembunyikan perbuatannya dari korban tatkala korban mencurigai adanya perselingkuhan dan korban menghendaki dihentikannya perselingkuhan tersebut. Selanjutnya kekerasan ekonomi yang ditimbulkan ketika pelaku tidak lagi memberikan nafkah setelah memiliki wanita idaman lain. Akumulasi kekerasan ini juga berlaku pada kekerasan seksual, yang sering disertai oleh kekerasan fisik dan emosional di dalamnya.